

**MANAJEMEN STRATEGIK
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF**

Oleh
Sukinah*)
Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multicultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik dan psikologis. Dalam pendidikan yang berlatar sekolah inklusif pembelajaran ditekankan pada penanaman sikap simpati, respect, apresiasi, dan empati terhadap latarbelakang sosial budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, sekolah inklusif merupakan tempat di mana komunitasnya belajar tentang bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan dan dihargai. Manajemen strategik adalah suatu gaya atau seni dan ilmu dari pembuatan, implementasi dan evaluasi atau penilaian keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi atau komponen-komponen yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem manajemen strategik paling sedikit harus memiliki tiga proses yaitu perencanaan, penerapan dan pengawasan strategik. Pengembangan lebih lengkap manajemen strategik yaitu mempunyai enam tahapan yaitu : (1) perumusan strategik, (2) perencanaan strategik, (3) penyusunan program, (4) penyusunan anggaran, (5) implementasi atau pelaksanaan, dan (6) evaluasi/pengawasan/pengendalian

Kata Kunci : Manajemen strategik, Pendidikan Inklusif

Pendahuluan

Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan kuat yang berdasarkan kepada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab I, Pasal 1 ayat (7), bahwa Pendidikan inklusif ditegaskan sebagai pendidikan regular yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistematis. Namun di samping itu Pendidikan inklusif juga di dukung oleh kesepakatan internasional, Pendidikan Untuk semua (PUS) yang terkenal dengan *Education for All* (EFA), berdasarkan Pernyataan Salamanca, pada kongres Internasional di kota Salamanca, Spanyol pada tahun 1994, yang antara lain menetapkan bahwa Semua anak sebaiknya belajar bersama tanpa diskriminasi, yang didasarkan kepada kebutuhan siswa, dan anak berkebutuhan khusus di beri layanan khusus di sekolah regular.

*) *Dosen Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UNY*

Selanjutnya dalam konferensi Dakar di Sinegal Afrika tahun 2000, menetapkan enam hal yaitu, Pendidikan anak dini usia (PADU), pendidikan dasar formal, pendidikan keterampilan hidup (*life skills*), Pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan jender, dan pendidikan dasar yang bermutu. Sedangkan pada konferensi yang di adakan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tahun 2005, yang antara lain menetapkan inklusi sebagai prinsip pelaksanaan pendidikan, dan kualitas pendidikan diharapkan meliputi perkembangan sosial, emosional dan fisik, akademik, dan kecerdasan spiritual, serta sistem assessment dan evaluasi pendidikan nasional tidak diskriminatif.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh siap atau belumnya lembaga penyelenggara. Perencanaan program pendidikan inklusif sangatlah penting artinya, karena akan memberikan arah implementasi dari rencana/program yang telah disusunnya. Terlaksananya pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu dirancang suatu program yang dapat mengarahkan pola kerja penyelenggara. Maka perlu dirancang program yang dapat mengarahkan bagi penyelenggara dalam pelaksanaannya. Perangkat program kerja tahunan sekolah penyelenggara inklusif sebagai acuan terlaksananya layanan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multicultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik dan psikologis. Pemahaman implementasi pendidikan inklusif tidak hanya dibatasi oleh makna tempat sebagaimana yang kita kenal dengan nama sekolah. Pendidikan inklusif adalah sebuah proses pemberdayaan individu sejak lahir dengan didasari pemahaman terbuka untuk meraih siapapun di dalamnya. Dalam praktiknya, terutama untuk memberi batasan pemahaman, pendidikan inklusif diwujudkan dalam latar sekolah yaitu suatu komunitas di mana di dalamnya terdapat dinamika sistem, anak didik, pendidik, dan masyarakat. Dalam pendidikan yang berlatar sekolah inklusif pembelajaran ditekankan pada penanaman sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap latarbelakang sosial budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, sekolah inklusif

merupakan tempat di mana komunitasnya belajar tentang bagaimana sikap toleransi terhadap keberagaman diposisikan dan dihargai. Sebuah filosofi pendidikan yang memiliki semangat toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan individu atau kelompok yang memiliki kepercayaan, sosial budaya, keberfungsian tubuh dan psikologi berbeda.

Manajemen Strategik

Manajemen merupakan suatu proses pengaturan atau penataan dan cara kerja sumberdaya manusia, material, dana, alat dan metode dengan mengintegrasikan sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan lainnya menjadi suatu sistem yang komprehensif dan integrative untuk mencapai tujuan usaha suatu organisasi yaitu dengan menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian menjadi suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam proses pendayagunaan semua sumber daya secara efektif dan efisien disertai penetapan cara pelaksanaannya oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen strategik adalah suatu gaya atau seni dan ilmu dari pembuatan, implementasi dan evaluasi atau penilaian keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi atau komponen-komponen yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Wahyudi dalam Iim Wasliman (2007) manajemen strategic adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang. Manajemen strategik dapat disimpulkan sebagai suatu langkah untuk memilih alternative strategi yang paling tepat bagi organisasi yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki konsekuensi harus dijalankan secara terus menerus serta fleksibel (luwes) berdasarkan tuntutan situasi kondisi lapangan yang dihadapi.

Sistem manajemen strategik paling sedikit harus memiliki tiga proses yaitu perencanaan, penerapan dan pengawasan strategik. Perencanaan strategik meliputi pengembangan visi, misi dan tujuan organisasi. Pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternative strategik dan penentuan strategik yang sesuai untuk diadopsi. Penerapan strategik yaitu penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi sumber daya manusia dan mengalokasikan sumber-sumber daya lainnya agar strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan (diimplementasikan). Sedangkan pengawasan atau pengendalian strategik yaitu usaha-usaha untuk memantau atau memonitor seluruh proses dan hasil dari pembuatan dan penerapan strategik. Dalam evaluasi atau kontrol strategik dilakukan pula pengukuran kinerja individu dan organisasi serta pengambilan tindakan perbaikan atau pengayaan jika diperlukan.

Pengembangan lebih lengkap manajemen strategik yaitu mempunyai enam tahapan yaitu : (1) perumusan strategik, (2) perencanaan strategik, (3) penyusunan program, (4) penyusunan anggaran, (5) implementasi atau pelaksanaan, dan (6) evaluasi/pengawasan/pengendalian. Dari keenam tahapan tersebut, maka perencanaan strategik merupakan tahapan yang sangat penting dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategik, setelah dirumuskan langkah-langkah strateginya yaitu tahapan perumusan strategi. (Iim Wasliman, 2007).

Langkah perencanaan strategis dalam mengimplementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif dari Wheelen dan Hunger (1994 dalam Hunger, 1996) sebagai berikut : (1) Mengevaluasi kerja saat ini, (2) Menguji dan mengevaluasi (misi, tujuan, strategi dan kebijakan saat ini), (3) Meninjau manajer strategis (Dewan komisaris, Manajemen puncak), (4) Analisis peluang dan ancaman (sosial, kerja), D2=Analisis kekuatan dan kelemahan (Struktur, budaya, sumber daya), (5) Menganalisis SWOT yang sesuai dengan kondisi sekarang, (6) Meninjau dan merevisi (jika perlu) misi dan tujuan, (7) Menghasilkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif strategis, (8) Menyeleksi dan merekomendasikan alternatif terbaik, (9) Strategi implementasi (program, anggaran, prosedur) dan (10) Evaluasi dan pengendalian.

Rancangan ini dikembangkan berdasarkan model perencanaan strategis dari Katz (1970 dalam Rowe et. Al. 1989). Model perencanaan tersebut dipergunakan untuk memetakan situasi dalam memantapkan elemen-elemen pendukung inklusi yang terdiri dari : (1) Kebijakan, Hukum, Perundang-undangan, Ekonomi; (2) Sikap, pengalaman, pengetahuan; (3) Kurikulum lokal, regional dan nasional; (4) Perubahan pendidikan potensial; (5) Adaptasi lingkungan, penciptaan kerja; (6) Kerjasama lintas sektoral (Skjortern. Tanpa tahun)

Implementasi Pendidikan Inklusif

Menurut Sapon-Sevin (Dyah, 2008), pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Jadi, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomis, jenis kelamin, suku budaya , tempat tinggal, bahasa dan sebagainya, dimana semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun nonformal yang berada di dekat tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Dyah (2008) mengutip pendapat para ahli bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang mengizinkan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat belajar di kelas pendidikan umum, dimana peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan utama di dalam kelas umum dan di bawah tanggung jawab seorang guru kelas umum, serta menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

Menurut Alimin (2008), Tarsidi (2008), Sunanto, dkk (2004) dalam situs <http://www.pkplk-plb.org>, bahwa sekolah inklusif memiliki karakteristik/ciri sebagai berikut:

1. Tidak diskriminatif. Artinya, sekolah inklusif harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak tanpa kecuali.
2. Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak. Berarti sekolah inklusif harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan; harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak; iklim belajar sesuai dengan prinsip-prinsip CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang sesuai kemampuan dan perkembangan anak
3. Fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak; sarana fisik sekolah memudahkan, aman dan nyaman untuk digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (aksesibel). Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, "Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan." Diperjelas dengan pasal 10 ayat 2 undang-undang yang sama, "Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat." Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan aksesibilitas fisik adalah lingkungan fisik yang oleh penyandang cacat dapat dihampiri, dimasuki atau dilewati, dan penyandang cacat itu dapat menggunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan. Dalam pengertian yang lebih luas, aksesibilitas fisik mencakup akses terhadap berbagai bangunan, alat transportasi dan komunikasi, serta berbagai fasilitas di luar ruangan termasuk sarana rekreasi.
4. Guru bekerja dalam tim. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tetapi merupakan pembelajaran terpadu dengan menerapkan tim interdisipliner

Keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah, sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga ada keterlibatan dan partisipasi LSM dan masyarakat yang lebih luas

Komponen-komponen sekolah inklusif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. **Komponen Kebijakan, Kurikulum dan Administrasi Sekolah**
 - a. *Kebijakan Sekolah.* Kebijakan sekolah harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak tanpa kecuali.
 - b. *Kurikulum.* Kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Komponen kurikulum meliputi tujuan/kompetensi, struktur dan isi mata pelajaran, strategi pembelajaran (metode, media, alat, sumber belajar), dan evaluasi.
 - c. *Administrasi Sekolah.* Administrasi sekolah harus mendokumentasikan seluruh informasi tentang siswa, termasuk kebutuhan khusus siswa, sehingga bisa dijadikan data untuk merancang program/layanan khusus bagi siswa yang bersangkutan.
2. **Sumber Daya Manusia.** Lingkungan sosial di sekolah, meliputi Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Staf administrasi, harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan anak.
3. **Sarana dan Prasarana.** Sarana dan prasarana sekolah harus memudahkan, aman dan nyaman untuk digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (aksesibel).

4. Kerjasama/jejaring. Harus ada keterlibatan dan partisipasi orang tua, masyarakat, dan LSM yang lebih luas; harus ada supporting system.

Perencanaan sebagai kegiatan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kebutuhan dan kebijakan

Penyusunan program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan karakteristik sasaran, sehingga perencanaan yang disusun merupakan penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Konsisten

Perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun sehingga kegiatan yang direncanakan itu berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya.

3. Efisien dan produktif

Perencanaan program harus berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara cermat optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas

4. Universal (Menyeluruh)

Ada misi utama yang ingin dicapai dalam perencanaan pendidikan inklusif yaitu :

1. Memberikan pemahaman yang benar tentang konsep inklusi serta mendorong munculnya dukungan dari pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga negeri untuk mensukseskan inklusi di Yogyakarta.
2. Menata sistem pendidikan dalam hal memperjelas fungsi dan tugas pokok masing-masing di lingkungan daerah maupun kabupaten, terkait dengan pelaksanaan inklusi.
3. Mempersiapkan guru untuk dapat melaksanakan inklusi.
4. Meningkatkan kompetensi ABK dan alternatif-alternatif usaha yang dapat dikembangkan sebagai komoditi yang unik dan bersaing.

Perencanaan strategik yang perlu dikembangkan untuk mencapai misi/tujuan di pada umumnya terbagi menjadi 4 langkah, yaitu :

1. Membangun pemahaman dan kemauan melalui sosialisasi.
2. Berkumpul untuk menyatukan visi, membentuk tim sukses, merencanakan, membagi tugas.
3. Membuat aturan yang jelas untuk pelaksanaan.
4. Mendorong usaha-usaha kreatif dalam hal pembelajaran, pekerjaan, kegiatan masyarakat dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka merencanakan pelaksanaan pendidikan inklusif berikut :

1. Acara sosialisasi inklusi melalui program TV maupun Radio melalui kerjasama dengan artis dan tokoh-tokoh terkemuka
2. Perumusan rencana aksi bersama (pemda, PT, LSM, resource center, Dinas Pendidikan, perwakilan Kepala SLB dan SD, pimpinan media massa dan media elektronik, DPRD komisi E) inklusi di Yogyakarta, termasuk pembentukan tim sukses dan pembagian tugas dan peranan masing-masing pihak.
3. Pembuatan mekanisme yang memberikan kejelasan sistem kepegawaian GPK (guru pendamping khusus) di propinsi sementara ABK yang sekolah secara inklusi di kabupaten.
4. Pembuatan peraturan teknis pelaksanaan inklusif yang didalamnya mencakup hadiah (*reward*) and hadiah (*punishment*)
5. Pengadaan acara yang memancing kreatifitas penemuan usaha baru yang unik dan kompetitif.
6. Penambahan matakuliah pendidikan inklusif di semua jurusan pada fakultas ilmu keguruan dan pendidikan.
7. Pengadaan evaluasi untuk pelaksanaan inklusi yang sudah berjalan sehingga langkah selanjutnya berpijak dari kondisi di lapangan yang sudah berjalan.
8. Peningkatan kemampuan manajemen sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif di tingkat SD,SMP, SMU dan PT.
9. Pelatihan guru-guru tentang pengembangan kurikulum, adaptasi dan manajemen kelas pada setting pendidikan inklusif.

Manajemen strategik dalam mengimplementasikan pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif meliputi proses sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategic pusat sumber dalam mengimplementasikan pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif (strategic formulating) meliputi kegiatan :
Merumuskan Visi dan Misi dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif : Merumuskan tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pelaksanaan pendidikan inklusif, Merumuskan sasaran-sasaran yang akan dicapai, Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelaksanaan pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif (SWOT), Mengembangkan alternatif-alternatif strategi yang dapat dipilih dan Merumuskan program strategic yang tepat untuk dilaksanakan pendidikan inklusif
2. Menerapkan rencana strategic implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif (strategic implementing) meliputi kegiatan : Menetapkan kebijakan sekolah inklusif, Merumuskan langkah-langkah strategic yang akan dilaksanakan sekolah inklusif, Memotivasi semua team pendidikan inklusif, Mensosialisasikan program dan kegiatan kepada semua pihak, Mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki sekolah, Membangun kerja sama dengan berbagai pihak dan, Melaksanakan program kerja dengan penuh kesungguhan.
3. Melaksanakan proses evaluasi strategic pelaksanaan pendidikan inklusif (*Strategic Evaluating*) meliputi kegiatan sebagai berikut : Memonitor seluruh kegiatan program inklusif, Mengukur kinerja staf (individu dan lembaga) Melakukan perbaikan program inklusif bila diperlukan dan, Merumuskan *feedback* untuk perencanaan pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif.

Penutup

Manajemen strategik dalam pelaksanaan pendidikan inklsuif yaitu mempunyai enam tahapan yaitu : (1) perumusan strategik, (2) perencanaan strategik, (3) penyusunan program, (4) penyusunan anggaran, (5) implementasi atau pelaksanaan, dan (6) evaluasi/pengawasan/pengendalian.

Implementasi pendidikan inklusif tidak diskriminatif artinya, sekolah inklusif harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak tanpa kecuali. Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak. Fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak; sarana fisik sekolah memudahkan, aman dan nyaman untuk digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (aksesibel). Guru bekerja dalam tim. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Daftar Pustaka

- Alimin, Zaenal. 2008a. *Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus sebagai Disiplin Ilmu*. (Catatan Kuliah Matrikulasi Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus SPs UPI TA 2008/2009)
- Alimin, Zaenal. 2008b. *Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus Dan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Online). Tersedia: <http://z-alimin.blogspot.com/2008/03/pemahaman-konsep-pendidikan-kebutuhan.html>. (16 Juni 2009)
- Dyah S. 2008. *Pengkajian Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. (online). Tersedia: http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_undangan/DYAH%20S_Pengkajian%20Pendidikan%20Inklusif.pdf (9 Januari 2009)
- Iim Wasliman, (2007), *Manajemen Sistem Pendidikan Kebutuhan Khusus perangkat sistem pengajaran modul*, Bandung, UPI Pascasarjana
- Iim Wasliman, (2009), *Pendidikan Inklusif Ramah Anak sebagai Strategi Membangun Rumah Masa Depan Pendidikan Indonesia*, Bandung, Depdiknas Kopertis wilayah IV Jabar STKIP
- Sunanto, Juang, dkk. 2004. *Pendidikan yang Terbuka Untuk Semua, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan UNESCO Kantor Jakarta.

Tarsidi, Didi. 2008. *Upaya Menciptakan Fasilitas Umum Dan Lingkungan Yang Aksesibel demi Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat untuk Hidup Mandiri dan Bermasyarakat.* (Makalah). Disajikan dalam seminar dalam rangka memperingati Hari Internasional Penyandang Cacat Propinsi Jawa Barat tahun 1997. (online). Tersedia: <http://d-tarsidi.blogspot.com/search/label/Aksesibilitas>. (17 November 2008).

Tarsidi, Didi., & Rahardja, Djadja. 2008. *Reviu Materi Mata Kuliah Pendidikan Inklusif.* (Catatan kuliah Pendidikan Inklusif semester 1 Prostudi Pendidikan Kebutuhan Khusus TA 2008/2009)

<http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=54> [25 Nov 2006]